



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA CIBURIAL KECAMATAN CIMENYAN KABUPATEN BANDUNG

Syifa Tijani Dhifa¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, perangkat desa, serta anggota KUBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KUBE di Desa Ciburial belum berjalan optimal. Dari dimensi komunikasi, penyampaian informasi belum merata dan berkelanjutan. Dimensi sumber daya menunjukkan pendampingan yang belum optimal dan pelatihan yang bersifat formalitas. Dimensi disposisi menunjukkan lemahnya komitmen anggota yang berdampak pada berkurangnya jumlah anggota aktif. Dimensi struktur birokrasi menunjukkan mekanisme dan prosedur kerja telah tersedia namun belum sepenuhnya diimplementasikan di lapangan, terutama dalam hal pelaporan dan monitoring berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi, pendampingan intensif, serta evaluasi berkelanjutan agar program KUBE dapat mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin secara optimal.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Desa Ciburial.

Abstract

This study analyzes the implementation of the Joint Business Group (Kelompok Usaha Bersama/KUBE) policy in Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency as an effort to economically empower the poor. The research method uses a descriptive qualitative approach with George C. Edwards III's policy implementation theory covering the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation with informants from the West Java Provincial Social Service, village officials, and KUBE members. The results show that the implementation of KUBE in Ciburial Village has not been optimal. From the communication dimension, information dissemination has not been equitable and sustainable. The resource dimension shows that mentoring has not been optimal and training is merely a formality. The disposition dimension shows weak commitment of

members which has an impact on the decreasing number of active members. The bureaucratic structure dimension shows that mechanisms and work procedures are available but have not been fully implemented in the field, especially in terms of reporting and continuous monitoring. This study recommends strengthening coordination, intensive mentoring, and continuous evaluation so that the KUBE program can achieve the goal of economically empowering the poor optimally.

Keywords: Policy Implementation, Joint Business Group (KUBE), Community Empowerment, Poverty, Ciburial Village.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia. Meskipun angka kemiskinan cenderung menurun setiap tahunnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada September 2024 masih terdapat 8,57 persen penduduk miskin atau sekitar 24,06 juta orang, yang kemudian menurun menjadi 8,47 persen atau 23,85 juta orang pada Maret 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan, angka kemiskinan di Indonesia masih dalam kategori tinggi dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu 50,76 juta jiwa, menghadapi tantangan serius dalam menekan angka kemiskinan. Kompleksitas sosial ekonomi yang tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,75 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi.

Sebagai respons terhadap permasalahan kemiskinan, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program yang diimplementasikan adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama. KUBE merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri serta meningkatkan kesetiarawan sosial.

Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program KUBE. Berdasarkan data DTKS tahun 2025, terdapat 427 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), 706 KPM yang memperoleh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan 3.282 KPM yang memperoleh PBI APBN. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Ciburial berada pada kelompok desil bawah hingga menengah yang mencerminkan adanya kerentanan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, KUBE di Desa Ciburial menghadapi berbagai kendala. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa komunikasi antar anggota belum sepenuhnya efektif akibat ketidaksamaan persepsi mengenai mekanisme KUBE. Selain itu, kemampuan anggota dalam mengelola dan memasarkan hasil peternakan masih terbatas karena pelatihan yang diberikan belum membahas secara teknis mengenai sistem penjualan dan strategi pemasaran. Permasalahan lain yang muncul adalah kesulitan dalam pembentukan kelompok karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kebijakan KUBE.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di tingkat desa, khususnya dalam konteks interaksi antar aktor kebijakan, dinamika pelaksanaan program, serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan kebijakan di lapangan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara sistematis,

faktual, dan kontekstual sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Fokus utama penelitian diarahkan pada implementasi kebijakan KUBE sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kerangka teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji sejauh mana kebijakan KUBE dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya di tingkat desa.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama informan adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan KUBE, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan program. Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan mampu memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai proses implementasi kebijakan KUBE.

Informan penelitian terdiri atas beberapa pihak yang mewakili aktor kebijakan di berbagai tingkatan. Informan tersebut meliputi: (1) Kepala Tim KUBE di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang berperan dalam perumusan kebijakan teknis dan pengawasan program; (2) Anggota Tim KUBE yang bertugas mengelola data dan administrasi program KUBE; (3) Perangkat Desa Ciburial yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di tingkat desa; (4) Ketua Kelompok KUBE sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan usaha; serta (5) Anggota Kelompok KUBE yang berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pelaksana utama kegiatan usaha. Keberagaman informan ini dimaksudkan untuk memperoleh sudut pandang yang berimbang antara pihak pembuat kebijakan, pelaksana, dan penerima manfaat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dengan tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas, namun tetap dalam kerangka topik penelitian. Observasi nonpartisipan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas kelompok KUBE, pola interaksi antar anggota, serta kondisi usaha yang dijalankan tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan tersebut. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian melalui penelaahan dokumen resmi seperti pedoman kebijakan, laporan kegiatan, data administrasi kelompok, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan pelaksanaan KUBE.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan secara bertahap dan terus menerus selama proses penelitian berlangsung untuk memastikan kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan temuan empiris.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kebijakan ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk bantuan sosial, tetapi sebagai instrumen kebijakan publik yang menekankan penguatan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelompok, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KUBE di

tingkat desa belum sepenuhnya mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi sebagaimana yang diharapkan.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan KUBE

Komunikasi merupakan elemen fundamental dalam proses implementasi kebijakan karena berfungsi sebagai sarana penyampaian tujuan, mekanisme, dan nilai-nilai kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Dalam konteks kebijakan KUBE di Desa Ciburial, komunikasi berlangsung antara Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, pemerintah desa, pendamping, serta anggota kelompok KUBE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar aktor kebijakan telah terbangun, namun belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Pada tahap awal pembentukan KUBE, sosialisasi kebijakan telah dilakukan oleh pihak terkait. Informasi mengenai tujuan program, mekanisme pelaksanaan, serta bentuk bantuan yang akan diterima telah disampaikan kepada calon anggota kelompok. Akan tetapi, penyampaian informasi tersebut cenderung bersifat satu arah dan belum diikuti dengan penguatan pemahaman secara berkelanjutan. Hal ini menyebabkan tidak semua anggota KUBE memiliki pemahaman yang sama mengenai esensi kebijakan KUBE sebagai program pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Ketidaksamaan persepsi antar anggota terlihat dalam praktik pelaksanaan usaha. Sebagian anggota masih memandang KUBE sebagai bantuan tambahan, bukan sebagai usaha produktif yang menuntut komitmen dan keterlibatan aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesan kebijakan mengenai kemandirian ekonomi dan tanggung jawab kolektif belum sepenuhnya tersampaikan secara efektif. Menurut Edwards III, komunikasi kebijakan harus memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan kontinuitas agar implementor mampu menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, komunikasi horizontal antar anggota KUBE memang terjalin dengan cukup baik, ditandai dengan adanya koordinasi rutin dan keterbukaan dalam pembagian tugas. Namun, komunikasi vertikal antara pemerintah dan anggota kelompok masih belum optimal, terutama dalam hal penyampaian evaluasi, umpan balik, dan pembinaan lanjutan. Keterbatasan

komunikasi berkelanjutan ini berimplikasi pada lemahnya internalisasi nilai-nilai pemberdayaan dalam diri anggota KUBE.

Dengan demikian, dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan KUBE di Desa Ciburial belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan kebijakan. Komunikasi yang belum konsisten dan berkelanjutan menyebabkan kebijakan KUBE belum dipahami secara utuh sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

Sumber Daya dalam Pelaksanaan KUBE

Sumber daya merupakan faktor penting yang menentukan kapasitas pelaksana kebijakan dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan KUBE di Desa Ciburial, sumber daya yang tersedia mencakup bantuan modal usaha, sumber daya manusia, pendampingan, serta fasilitas pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bantuan modal telah disalurkan, namun pemanfaatannya belum memberikan dampak ekonomi yang optimal.

Keterbatasan utama dalam dimensi sumber daya terletak pada kualitas sumber daya manusia anggota KUBE. Sebagian besar anggota belum memiliki keterampilan kewirausahaan yang memadai, khususnya dalam aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, dan pemasaran hasil ternak. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah masih bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan teknis yang dihadapi kelompok di lapangan. Akibatnya, anggota KUBE mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, pendampingan yang seharusnya menjadi komponen penting dalam kebijakan KUBE belum berjalan secara intensif. Pendampingan yang terbatas menyebabkan kelompok KUBE kurang mendapatkan arahan strategis dalam menghadapi tantangan usaha, terutama dalam hal pemasaran hasil ternak yang bersifat musiman. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan pendapatan dan lemahnya posisi KUBE sebagai sumber penghidupan utama bagi anggotanya.

Edwards III menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya tidak hanya diukur dari jumlah bantuan, tetapi juga dari kemampuan pelaksana dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut. Dalam konteks Desa

Ciburial, ketidakseimbangan antara bantuan modal dan penguatan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa dimensi sumber daya belum sepenuhnya mendukung keberhasilan implementasi kebijakan KUBE.

Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan motivasi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program. Dalam implementasi kebijakan KUBE di Desa Ciburial, disposisi pelaksana menunjukkan kondisi yang beragam. Di tingkat pengurus KUBE dan pemerintah desa, terdapat komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian tugas antar pengurus telah disepakati dan dijalankan secara konsisten.

Namun, disposisi sebagian anggota KUBE masih tergolong lemah. Rendahnya komitmen anggota tercermin dari tingkat partisipasi yang belum optimal dalam kegiatan usaha. Beberapa anggota masih mengandalkan sumber pendapatan lain di luar KUBE, sehingga usaha peternakan domba belum dijadikan sebagai prioritas utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan mental dan motivasi anggota dalam menerima kebijakan KUBE sebagai program pemberdayaan jangka panjang masih terbatas.

Lemahnya disposisi anggota tidak terlepas dari proses awal pembentukan kelompok yang mengalami berbagai kendala. Sulitnya menemukan anggota yang bersedia dan memiliki komitmen menunjukkan bahwa kebijakan KUBE belum sepenuhnya dipahami dan diterima oleh masyarakat sasaran. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kesesuaian sikap pelaksana dengan tujuan kebijakan. Ketika pelaksana tidak memiliki motivasi yang kuat, maka pelaksanaan kebijakan cenderung berjalan tidak optimal.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi KUBE

Struktur birokrasi berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur mekanisme pelaksanaan kebijakan, pembagian peran, serta koordinasi antar aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaan kebijakan KUBE di Desa Ciburial, struktur birokrasi pada dasarnya telah tersedia dan tertata dengan cukup baik. Regulasi, prosedur kerja, serta mekanisme administrasi telah ditetapkan mulai dari tingkat pusat hingga desa.

Koordinasi antara pengurus KUBE dan pemerintah desa juga berjalan relatif lancar, terutama dengan adanya peran sekretaris KUBE yang sekaligus menjadi bagian dari aparat desa. Kondisi ini mempermudah komunikasi dan pengurusan administrasi program. Namun demikian, implementasi struktur birokrasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan KUBE belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Akibatnya, berbagai permasalahan yang muncul di lapangan tidak segera teridentifikasi dan ditangani secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang ada belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat pengendali dan pengawas pelaksanaan kebijakan.

Keberlanjutan merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks KUBE di Desa Ciburial, keberlanjutan program masih menghadapi berbagai tantangan. Penurunan jumlah anggota aktif dan stagnasi perkembangan usaha menunjukkan bahwa KUBE belum mampu menjadi sumber penghidupan yang stabil bagi anggotanya.

Salah satu tantangan utama adalah belum adanya strategi pengembangan usaha jangka panjang yang terencana. Usaha peternakan domba yang dijalankan masih bersifat konvensional dan belum terintegrasi dengan jaringan pemasaran yang lebih luas. Ketergantungan pada pasar lokal dan penjualan musiman menyebabkan pendapatan kelompok tidak stabil. Selain itu, belum adanya sistem evaluasi kinerja kelompok yang terukur juga menyulitkan pemerintah dalam menentukan arah pengembangan program. Tanpa indikator keberhasilan yang jelas, implementasi KUBE berpotensi berjalan secara rutin tanpa adanya peningkatan kualitas dan capaian program.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Implementasi KUBE di Desa Ciburial menunjukkan bahwa kebijakan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Bantuan modal perlu diposisikan sebagai stimulus awal, bukan sebagai tujuan akhir kebijakan.

Pemerintah perlu memperkuat desain implementasi kebijakan dengan menekankan aspek penguatan kapasitas, pengembangan jejaring usaha, serta peningkatan peran pemerintah desa sebagai aktor kunci di tingkat lokal. Selain itu, diperlukan perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan, dari pendekatan berbasis bantuan menuju pendekatan berbasis kemandirian dan keberlanjutan. Dengan demikian, implementasi kebijakan KUBE tidak hanya dinilai dari terlaksananya program secara administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin secara nyata dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kelengkapan prosedur administratif, tetapi sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di tingkat lokal. Meskipun kebijakan KUBE telah memiliki landasan hukum yang jelas serta dirancang dengan mekanisme pelaksanaan yang sistematis, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan capaian aktual program. Kesenjangan ini menandakan bahwa kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

Permasalahan utama dalam implementasi KUBE di Desa Ciburial tidak berdiri secara tunggal, melainkan bersifat struktural dan saling berkaitan. Lemahnya intensitas komunikasi dan pendampingan menyebabkan tujuan strategis kebijakan tidak dipahami secara utuh oleh seluruh anggota kelompok. Kondisi ini berdampak pada munculnya orientasi jangka pendek dalam pengelolaan usaha, di mana sebagian anggota lebih memandang KUBE sebagai sumber bantuan sesaat dibandingkan sebagai sarana membangun kemandirian ekonomi kolektif. Akibatnya, keberlanjutan usaha kelompok menjadi tidak stabil dan partisipasi anggota cenderung menurun seiring waktu.

Di sisi lain, keterbatasan kualitas sumber daya pendukung, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas kewirausahaan dan pemasaran, menunjukkan bahwa pendekatan implementasi kebijakan masih lebih menekankan pada penyaluran bantuan modal dibandingkan penguatan kemampuan masyarakat. Tanpa adanya proses pembelajaran yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan pasar, kelompok KUBE mengalami kesulitan untuk berkembang dan bersaing secara mandiri. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, yang menyebabkan pemerintah tidak memiliki gambaran utuh mengenai perkembangan program serta kesulitan dalam melakukan intervensi kebijakan secara tepat waktu.

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan KUBE di tingkat desa masih menghadapi tantangan mendasar dalam mewujudkan prinsip pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan administratif dan teknokratis, melainkan memerlukan proses pendampingan yang konsisten, relasi yang partisipatif, serta komitmen bersama antara pemerintah dan kelompok sasaran. Dengan demikian, implementasi kebijakan KUBE perlu dipahami sebagai proses sosial yang dinamis, bukan sekadar pelaksanaan program berbasis anggaran.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas kebijakan KUBE mensyaratkan adanya sinergi yang kuat antar seluruh aktor yang terlibat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat peran pendampingan dan pengawasan melalui mekanisme monitoring yang sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu mengambil peran strategis sebagai fasilitator dan penghubung antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat. Sementara itu, kelompok KUBE dituntut untuk membangun komitmen internal yang lebih kuat, tata kelola usaha yang profesional, serta kesadaran kolektif bahwa keberhasilan program bergantung pada partisipasi aktif seluruh anggota. Apabila sinergi tersebut dapat diwujudkan, kebijakan KUBE berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). Tingkat Kemiskinan Kembali Menurun. Retrieved from <https://www.bps.go.id>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2021). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waruwu, R. O., et al. (2024). Penelitian Kualitatif. *Jurnal EMBA*, 12(3), 1045-1055.